

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEASISTENAN UTAMA V
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irma Syarifah
Jabatan : Kepala Keasistenan Utama V
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA KEASISTENAN UTAMA V,

Mokhammad Najih

Irma Syarifah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEASISTENAN UTAMA V
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	60 Laporan
	Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	2 Laporan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	
Output 1: Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat	Rp 451.308.000
Output 2: Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Rp 168.224.000
Total	Rp 619.532.000

Jakarta, Januari 2026

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA KEASISTENAN UTAMA V,



Mokhammad Najih



Irma Syarifah



DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEASISTENAN UTAMA V

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	60 Laporan	Merupakan keluaran atas kegiatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat. Laporan yang dimaksud adalah laporan masyarakat yang diselesaikan (ditutup) pada tahun 2026 di tahap pemeriksaan. Laporan yang diselesaikan merupakan penyelesaian (penutupan) laporan yang ditangani pada tahun 2026 (laporan yang diterima pada tahun 2026 dan laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup/ <i>backlog</i>).	Data SIMPeL	Dihitung dengan menjumlahkan seluruh laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan (ditutup) pada tahun 2026 (laporan yang diterima pada tahun 2026 dan laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup/ <i>backlog</i>). $\sum LMS = LMS_1 + LMS_2 + \dots + LMS_n$ $\sum LMS$: Jumlah laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan (ditutup) LMS : Laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan (ditutup) pada tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
					dan laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup (<i>backlog</i>)
	Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	2 Laporan	Merupakan keluaran atas kegiatan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Laporan yang dimaksud adalah laporan pengawasan Ombudsman melalui investigasi atas prakarsa sendiri pada tahun 2026 yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik.	Laporan IAPS	Dihitung berdasarkan jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) pada tahun 2026 yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik